

ANALISIS EFEK MULTIPLIER SEKTOR BASIS TERHADAP PEREKONOMIAN KABUPATEN BIAK NUMFOR 2019-2023

Immanuel Kefas Oktovianus Fairyo¹

Pisi Bethania Titalessy²

bethaniapisi@yahoo.com

Yundy Hafizrianda³

yundihafizrianda@feb.uncen.ac.id

ABSTRACT

This study aims to identify base sectors and analyze the magnitude of the multiplier effect of these sectors on the economy of Biak Numfor Regency during the 2019–2023 period. The study employs a quantitative approach using secondary data in the form of Gross Regional Domestic Product (GRDP) of Biak Numfor Regency and Papua Province. The analysis applies the Location Quotient (LQ) method to determine base and non-base sectors, as well as multiplier effect analysis to measure the impact of base sectors on the regional economy. The results indicate that there are nine base sectors, namely agriculture, forestry and fisheries; mining and quarrying; manufacturing; electricity and gas supply; water supply and waste management; trade; transportation; financial services; and government administration. Meanwhile, eight sectors are classified as non-base sectors, including construction; accommodation and food services; information and communication; real estate; business services; education; health services; and other services. The average multiplier effect value of 1.3059 implies that every one-unit increase in base sector output contributes to an increase in total regional economic output. However, the declining trend of the multiplier effect during the 2020–2023 period indicates weak linkages between base and non-base sectors. Therefore, local governments need to promote the development of fishery-based processing industries and enhance the capacity of non-base sectors, particularly construction, education, and health services, in order to optimize the multiplier effect and support regional economic growth.

Keywords: Multiplier effect, base sector, non-base sector, Location Quotient, GRDP, Biak Numfor Regency, regional economic growth

PENDAHULUAN

Penelitian ini berangkat dari pemahaman dasar tentang pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh Subandi (2011), bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terencana untuk mendapatkan kondisi masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya. Setiap negara menginginkan adanya peningkatan taraf hidup masyarakatnya secara adil dan merata. Untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang lebih baik, diperlukan langkah-langkah mulai dari mengidentifikasi potensi-potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki, kemudian menyusun rencana pembangunan, dan melaksanakannya melalui partisipasi masyarakat untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Namun demikian, perencanaan pembangunan di Indonesia selama ini yang dilakukan dengan pendekatan sektoral, meskipun telah berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi, justru menimbulkan berbagai permasalahan baru, kesenjangan pembangunan antar wilayah yang semakin melebar.

Fenomena kesenjangan ini terjadi karena sektor-sektor ekonomi yang diprioritaskan memang mampu bertumbuh dengan cepat, namun pertumbuhan tersebut hanya terjadi di wilayah yang memiliki

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

² Staf Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

³ Staf Dosen Magister Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

potensi pengembangan sektor ekonomi tersebut. Sebaliknya, bagi wilayah yang kurang berpotensi pada sektor tersebut, pertumbuhan ekonomi hanya berlangsung dengan lamban. Oleh karena adanya perbedaan potensi ekonomi masing-masing wilayah, maka setiap daerah harus dikelola dengan program pembangunan yang lebih spesifik dan sesuai dengan karakteristik wilayahnya masing-masing.

Teori efek multiplier atau efek pengganda memiliki peran penting dalam pemahaman pertumbuhan ekonomi daerah. Efek multiplier dapat meningkatkan pendapatan nasional secara signifikan ketika pemerintah melakukan investasi, misalnya membangun infrastruktur, yang kemudian akan menciptakan lapangan kerja baru. Para pekerja ini selanjutnya akan membelanjakan pendapatannya, yang akan mendorong permintaan terhadap barang dan jasa lainnya, sehingga menciptakan lebih banyak lagi lapangan kerja. Multiplier effect juga berperan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi karena dengan meningkatnya permintaan, produsen akan terdorong untuk meningkatkan produksi, yang pada gilirannya akan mendorong investasi dan inovasi. Namun di sisi lain, efek multiplier juga memiliki dampak negatif seperti inflasi jika terlalu kuat, serta meningkatnya utang pemerintah untuk membiayai pengeluaran pembangunan.

Menurut Sapriadi dan Hasbiullah (2015), perekonomian daerah atau wilayah merupakan ukuran kinerja secara luas dari perekonomian makro daerah yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja sektoral perekonomian, serta tingkat biaya hidup. Sementara itu, Arsyad (2013) mendefinisikan pembangunan ekonomi daerah sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, sektor basis, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antardaerah, dan antarsektor.

Konsep sektor basis menjadi sangat penting dalam analisis ekonomi daerah. Sektor basis merupakan sektor perekonomian yang menjadi sektor dominan atau sektor yang menonjol dari suatu daerah. Dengan diketahui sektor basis suatu daerah, maka pemerintah dan masyarakat daerah tersebut dapat terus mengembangkannya, sehingga sektor basis tersebut dapat menjadi sektor yang menguntungkan. Menurut teori basis ekspor, suatu wilayah bertumbuh atau berkembang sebagai akibat dari spesialisasi dalam kegiatan ekspor, karena dengan ekspor akan diperoleh pendapatan yang dapat meningkatkan kekayaan atau kemampuan suatu wilayah untuk melaksanakan pembangunan dan membayar harga barang-barang yang diimpornya dari wilayah luar (Purnomo, 2024).

Logika dasar dari analisis Location Quotient (LQ) yang digunakan dalam penelitian ini berlandaskan pada teori basis ekonomi. Sebagaimana dijelaskan oleh Fretes (2018), inti dari teori basis ekonomi adalah bahwa industri basis menghasilkan barang-barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun di luar daerah yang bersangkutan, sehingga penjualan ke luar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Arus pendapatan dari luar daerah ini selanjutnya menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi di daerah tersebut, yang pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru. Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya menaikkan permintaan terhadap industri basis, tetapi juga menaikkan permintaan akan industri non basis atau lokal.

Teori pertumbuhan tidak seimbang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh jika sektor basis mengalami pertumbuhan, dan pertumbuhan sektor basis seharusnya mempunyai dampak multiplier terhadap output, pendapatan, dan tenaga kerja dalam perekonomian. Namun kenyataannya, di Kabupaten Biak Numfor, pertumbuhan sektor basis masih belum bisa mendorong dan menarik sektor-sektor lainnya secara optimal. Kondisi inilah yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini, sehingga perlu dikaji kembali bagaimana dampak multiplier pertumbuhan sektor basis terhadap perekonomian di daerah tersebut.

Fenomena yang menarik sekaligus menjadi latar belakang utama penelitian ini adalah terjadinya perlambatan ekonomi di Kabupaten Biak Numfor. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor, nilai perkembangan PDRB Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2019 mencapai 117,41 persen, namun pada tahun 2021 nilai perkembangan PDRB hanya mencapai angka 100,02 persen. Kondisi ini sangat kontras jika dibandingkan dengan pertumbuhan perekonomian Provinsi Papua secara keseluruhan. Berdasarkan perhitungan BPS Provinsi Papua, perkembangan perekonomian Provinsi Papua menyentuh angka 100,01 persen di tahun 2023, sedangkan tahun sebelumnya senilai 117,41 persen. Ironisnya, di saat pertumbuhan perekonomian wilayah Papua sedang

melesat, justru terjadi perlambatan perekonomian di Kabupaten Biak Numfor, yang notabene merupakan daerah yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia tertinggi di Provinsi Papua pada tahun 2023.

Menurut paparan Hamdani selaku Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kabupaten Biak Numfor, perlambatan ekonomi di Biak Numfor terjadi meskipun daerah ini memiliki keunggulan komparatif di berbagai sektor. Pendapat tersebut diperkuat dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2016 yang mencatat bahwa konsumsi barang non makanan dan jasa penduduk Biak Numfor hanya sebesar 46 persen dari total keseluruhan konsumsi penduduk. Dengan demikian, pola konsumsi masyarakat juga merupakan faktor yang berpengaruh pada perlambatan ekonomi di daerah ini.

Berdasarkan data PDRB Kabupaten Biak Numfor tahun 2019-2023 (BPS Provinsi Papua, 2024), terlihat bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mendominasi dengan persentase yang terus meningkat dari 18,78 persen pada tahun 2019 menjadi 21,38 persen pada tahun 2023. Sektor administrasi pemerintahan juga memiliki kontribusi yang besar, berkisar antara 19,48 persen hingga 20,77 persen selama periode tersebut. Sektor perdagangan besar dan eceran juga menunjukkan kontribusi yang stabil sekitar 18 persen. Sementara itu, sektor-sektor seperti pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, serta jasa perusahaan memiliki kontribusi yang relatif kecil terhadap PDRB daerah. Data PDRB ini menjadi bahan utama untuk mengidentifikasi sektor-sektor mana saja yang termasuk sektor basis dan sektor non basis di Kabupaten Biak Numfor, karena PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di daerah tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini menetapkan dua rumusan masalah utama. Pertama, sektor perekonomian manakah yang menjadi sektor basis pada Kabupaten Biak Numfor. Kedua, berapa besar efek multiplier sektor basis terhadap perekonomian Kabupaten Biak Numfor. Kedua pertanyaan penelitian ini menjadi fokus utama yang akan dijawab melalui analisis data PDRB Kabupaten Biak Numfor dan PDRB Provinsi Papua selama periode 2019 hingga 2023. Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Tujuan pertama adalah untuk mengetahui dan menganalisis sektor ekonomi yang menjadi sektor basis pada Kabupaten Biak Numfor. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui dan menganalisis gambaran pola pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Biak Numfor, termasuk bagaimana efek multiplier dari sektor basis tersebut berdampak terhadap perekonomian daerah secara keseluruhan.

Penelitian ini menarik diangkat karena terdapat fenomena kontradiktif di mana Kabupaten Biak Numfor yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia tertinggi di Provinsi Papua justru mengalami perlambatan ekonomi, bertolak belakang dengan pertumbuhan ekonomi Papua secara umum yang meningkat. Selain itu, terjadi kesenjangan antara teori yang menyatakan bahwa sektor basis seharusnya memberikan efek multiplier positif terhadap perekonomian, namun realitanya sektor basis di Biak Numfor belum mampu mendorong sektor lain secara optimal. Penelitian ini juga memiliki urgensi kebijakan yang tinggi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pembangunan berbasis potensi lokal, di tengah keterbatasan kajian serupa di kawasan Papua, serta periode penelitian 2019-2023 yang mencakup masa pandemi memberikan gambaran unik tentang resiliensi ekonomi daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber utama analisis. Data yang digunakan adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Biak Numfor dan PDRB Provinsi Papua atas dasar harga konstan selama periode 2019 hingga 2023. Pemilihan periode lima tahun ini dimaksudkan untuk menangkap dinamika pertumbuhan ekonomi yang relatif terkini sekaligus mencakup masa pandemi COVID-19 sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang resiliensi sektor basis daerah. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Biak Numfor, BPS Provinsi Papua, web resmi pemerintahan Kabupaten Biak Numfor, serta berbagai publikasi statistik dan laporan terkait lainnya. Data PDRB yang dikumpulkan mencakup 17 sektor lapangan usaha, yaitu pertanian kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air dan pengelolaan sampah, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real

estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua alat analisis utama yang diterapkan secara berurutan.

Pertama adalah analisis Location Quotient (LQ) yang berfungsi untuk mengidentifikasi sektor-sektor basis dan non basis di Kabupaten Biak Numfor dengan rumus $LQ = (V_{IR}/V_R) / (V_I/V)$, dimana V_{IR} adalah PDRB suatu sektor di kabupaten, V_R adalah total PDRB kabupaten, V_I adalah PDRB sektor yang sama di provinsi, dan V adalah total PDRB provinsi. Jika nilai LQ lebih besar dari 1, sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor basis yang berarti memiliki spesialisasi lebih tinggi dibanding provinsi dan mampu mengekspor ke luar daerah. Sebaliknya, jika LQ kurang dari 1, sektor tersebut termasuk non basis yang masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.

Kedua adalah perhitungan multiplier effect sektor basis menggunakan rumus $MP_{SR} = 1/(1 - (\sum Y_n/\sum Y))$, dimana $\sum Y$ adalah total PDRB kabupaten dan $\sum Y_n$ adalah total PDRB sektor non basis. Angka multiplier yang dihasilkan menunjukkan seberapa besar efek pengganda yang ditimbulkan oleh perubahan pada sektor basis terhadap keseluruhan perekonomian daerah, sehingga dapat diketahui apakah sektor basis benar-benar berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi sebagaimana diprediksi oleh teori basis ekonomi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan temuan penting mengenai kondisi perekonomian Kabupaten Biak Numfor selama periode 2019 hingga 2023. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Biak Numfor yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan selama lima tahun. Berikut adalah data lengkap PDRB Kabupaten Biak Numfor tahun 2019-2023.

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.030.351	1.038.232	1.119.107	1.235.143	1.342.965
Pertambangan dan Penggalian	55.514	53.251	56.388	58.253	66.449
Industri Pengolahan	201.935	216.741	228.486	236.852	238.942
Pengadaan Listrik dan Gas	13.265	12.682	13.113	14.319	15.606
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.756	7.480	7.764	8.035	8.536
Konstruksi	364.214	340.815	349.416	374.224	403.771
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.006.684	967.656	1.003.628	1.083.487	1.155.228
Transportasi dan Pergudangan	570.770	389.921	404.222	445.100	510.862
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	45.837	41.309	48.403	52.264	56.671
Informasi dan Komunikasi	200.009	209.013	210.017	220.023	229.278
Jasa Keuangan dan Asuransi	243.147	229.818	231.736	254.188	273.638
Real Estate	264.968	256.872	255.775	260.824	274.429
Jasa Perusahaan	124.025	121.004	122.283	123.825	128.907
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.068.502	1.040.182	1.141.862	1.177.833	1.236.505
Jasa Pendidikan	144.584	132.707	133.198	138.923	152.421
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	89.659	112.163	116.344	120.843	122.228
Jasa Lainnya	54.888	53.825	55.962	61.024	65.184
Total PDRB	5.486.108	5.223.670	5.497.704	5.865.160	6.281.619

Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023

Pada tahun 2019, total PDRB Kabupaten Biak Numfor tercatat sebesar 5.486.108 juta rupiah, kemudian sempat menurun menjadi 5.223.670 juta rupiah pada tahun 2020 sebagai dampak awal pandemi COVID-19, lalu meningkat kembali menjadi 5.497.704 juta rupiah pada tahun 2021, 5.865.160

juta rupiah pada tahun 2022, dan mencapai puncaknya sebesar 6.281.619 juta rupiah pada tahun 2023. Berdasarkan lapangan usaha, kontribusi tertinggi terhadap PDRB Kabupaten Biak Numfor berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menunjukkan tren peningkatan dari 1.030.351 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 1.342.965 juta rupiah pada tahun 2023. Sektor administrasi pemerintahan juga memberikan kontribusi yang signifikan, disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran.

Tabel 2. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Biak Numfor Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2023 (dalam %)

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	18,78	19,88	20,36	21,06	21,38
Pertambangan dan Penggalian	18,78	1,02	1,03	0,99	1,06
Industri Pengolahan	3,68	4,15	4,16	4,04	3,80
Pengadaan Listrik dan Gas	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Konstruksi	6,64	6,52	6,36	6,38	6,43
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,35	18,52	18,26	18,47	18,39
Transportasi dan Pergudangan	10,40	7,46	7,35	7,59	8,13
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,48	0,79	0,88	0,89	0,90
Informasi dan Komunikasi	3,65	4,00	3,82	3,75	3,65
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,43	4,40	4,22	4,33	4,36
Real Estate	4,83	4,92	4,65	4,45	4,37
Jasa Perusahaan	2,26	2,32	2,22	2,11	2,05
Administrasi Pemerintahan	19,48	19,91	20,77	20,08	19,68
Jasa Pendidikan	2,64	2,54	2,42	2,37	2,43
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,63	2,15	2,12	2,06	1,95
Jasa Lainnya	1,00	1,03	1,02	1,04	1,04
Produk Domestik Regional Bruto	117,41	99,99	100,02	99,99	100,01

Sumber: data diolah (2024)

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mendominasi dengan persentase yang terus meningkat dari 18,78 persen pada tahun 2019 menjadi 21,38 persen pada tahun 2023. Sektor administrasi pemerintahan juga memiliki kontribusi yang besar, berkisar antara 19,48 persen hingga 20,77 persen. Sektor perdagangan besar dan eceran menunjukkan kontribusi yang stabil sekitar 18 persen. Yang menarik, total PDRB yang disajikan dalam baris terakhir menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dengan angka 117,41 pada tahun 2019 kemudian turun drastis menjadi 99,99 pada tahun 2020, yang mengindikasikan perlambatan ekonomi yang cukup serius.

Hasil analisis Location Quotient (LQ) yang merupakan alat analisis pertama dalam penelitian ini berhasil mengidentifikasi sektor-sektor basis dan non basis di Kabupaten Biak Numfor. Berikut adalah hasil perhitungan LQ secara lengkap.

Tabel 3. Hasil Perhitungan LQ PDRB Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023	Rata ²	Klasifikasi
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,298	1,350	1,385	1,446	1,501	1,394	Basis
Pertambangan dan Penggalian	1,249	1,216	1,263	1,207	1,293	1,239	Basis
Industri Pengolahan	1,159	1,294	1,347	1,332	1,282	1,289	Basis
Pengadaan Listrik dan Gas	1,735	3,428	3,802	3,835	3,624	3,291	Basis
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,288	1,344	1,091	1,313	1,292	1,261	Basis
Konstruksi	0,345	0,318	0,303	0,309	0,318	0,319	Non Basis
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,305	1,274	1,244	1,204	1,185	1,243	Basis
Transportasi dan Pergudangan	1,068	1,195	1,108	1,046	1,041	1,092	Basis
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,548	0,630	0,677	0,686	0,692	0,647	Non Basis
Informasi dan Komunikasi	0,642	0,648	0,607	0,603	0,591	0,618	Non Basis
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,378	1,392	1,321	1,291	1,207	1,318	Basis

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023	Rata ²	Klasifikasi
Real Estate	1,049	1,052	0,970	0,939	0,913	0,985	Non Basis
Jasa Perusahaan	0,958	0,987	0,938	0,770	0,807	0,892	Non Basis
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,471	1,483	1,604	1,632	1,669	1,572	Basis
Jasa Pendidikan	0,871	0,843	0,781	0,869	0,864	0,846	Non Basis
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,604	0,721	0,689	0,680	0,649	0,669	Non Basis
Jasa Lainnya	0,559	0,563	0,549	0,585	0,464	0,544	Non Basis

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 3 di atas, ditemukan bahwa terdapat sembilan sektor yang tergolong sebagai sektor basis dengan nilai LQ rata-rata lebih besar dari 1. Sektor pengadaan listrik dan gas memiliki nilai LQ tertinggi yaitu 3,291, diikuti oleh sektor administrasi pemerintahan (1,572), sektor pertanian kehutanan dan perikanan (1,394), sektor jasa keuangan dan asuransi (1,318), sektor industri pengolahan (1,289), sektor pengadaan air (1,261), sektor perdagangan (1,243), sektor pertambangan (1,239), dan sektor transportasi (1,092). Sektor pertanian menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari 1,298 pada tahun 2019 menjadi 1,501 pada tahun 2023, yang mengindikasikan semakin kuatnya posisi sektor ini sebagai sektor basis.

Sementara itu, terdapat delapan sektor yang tergolong sebagai sektor non basis. Sektor konstruksi memiliki nilai LQ terendah yaitu hanya 0,319, diikuti oleh sektor jasa lainnya (0,544), sektor informasi dan komunikasi (0,618), sektor penyediaan akomodasi (0,647), sektor jasa kesehatan (0,669), sektor jasa pendidikan (0,846), sektor jasa perusahaan (0,892), dan sektor real estate (0,985). Menariknya, sektor real estate memiliki nilai LQ yang sangat mendekati angka 1 yaitu 0,985, yang berarti sektor ini berada di ambang batas antara basis dan non basis.

Tabel 4. Ringkasan Sektor Basis dan Non Basis Kabupaten Biak Numfor

Klasifikasi	Sektor-sektor
Sektor Basis (9 sektor)	<ol style="list-style-type: none"> Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Jasa Keuangan dan Asuransi Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
Sektor Non Basis (8 sektor)	<ol style="list-style-type: none"> Konstruksi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Real Estate Jasa Perusahaan Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya

Sumber: data diolah (2024)

Hasil analisis multiplier effect sektor basis merupakan temuan kunci dari penelitian ini. Berdasarkan perhitungan dengan rumus $MPSR = 1/(1 - (\sum Y_n/\sum Y))$, diperoleh nilai multiplier sektor basis untuk Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut:

Tabel 5. Analisis Efek Multiplier Sektor Basis Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 (dalam juta rupiah)

Komponen Multiplier	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
---------------------	------	------	------	------	------	-----------

Total PDRB (Y)	5.486.108	5.223.670	5.497.704	5.865.160	6.281.619	5.670.852
PDRB Basis (Yb)	4.197.924	3.955.962	4.206.306	4.513.210	4.848.731	4.344.427
PDRB Non Basis (Yn)	1.288.184	1.267.708	1.291.398	1.351.950	1.432.888	1.326.425
Yn / Y	0,2348	0,2427	0,2349	0,2305	0,2281	0,2342
1 - (Yn/Y)	0,7652	0,7573	0,7651	0,7695	0,7719	0,7658
Multiplier Sektor Basis	1,3069	1,3205	1,3070	1,2996	1,2955	1,3059

Sumber: data diolah (2024)

Mengacu pada Tabel 5 di atas, terlihat nilai multiplier sektor basis pada tahun 2019 adalah 1,3069, meningkat menjadi 1,3205 pada tahun 2020, kemudian turun menjadi 1,3070 pada tahun 2021, 1,2996 pada tahun 2022, dan 1,2955 pada tahun 2023. Nilai rata-rata multiplier selama lima tahun adalah sebesar 1,3059. Angka ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan output sebesar 1 unit pada sektor basis akan menghasilkan peningkatan output total perekonomian Kabupaten Biak Numfor sebesar 1,31 unit. Dengan kata lain, efek pengganda yang ditimbulkan oleh sektor basis terhadap perekonomian daerah adalah sebesar 0,31 kali atau 31 persen di luar peningkatan awal yang terjadi pada sektor basis itu sendiri. Nilai multiplier yang konsisten di atas angka 1 selama periode penelitian mengindikasikan bahwa sektor basis di Kabupaten Biak Numfor secara positif memiliki efek multiplier terhadap perekonomian daerah.

B. Pembahasan

Pembahasan lebih mendalam terhadap setiap sektor memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika perekonomian Kabupaten Biak Numfor. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai sektor basis unggulan memiliki peran yang sangat besar terhadap perekonomian daerah. Subsektor perikanan menjadi andalan utama mengingat kondisi geografis Kabupaten Biak Numfor yang dikelilingi laut dengan potensi sumber daya kelautan yang melimpah. Namun demikian, sektor industri pengolahan yang berbasis pertanian dan perikanan masih belum berkembang secara optimal, terbukti dengan nilai LQ sektor industri pengolahan yang hanya 1,289 atau berada di peringkat keempat dari sembilan sektor basis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Biak Numfor memiliki potensi bahan baku yang melimpah dari sektor perikanan, namun kegiatan pengolahan lanjutan masih terbatas sehingga nilai tambah yang dapat diciptakan di dalam daerah juga terbatas.

Sektor pengadaan listrik dan gas memiliki nilai LQ tertinggi yaitu 3,291, yang secara statistik menunjukkan bahwa sektor ini sangat basis di Kabupaten Biak Numfor. Namun perlu dicermati bahwa nilai LQ yang sangat tinggi ini bisa jadi disebabkan oleh keberadaan infrastruktur kelistrikan yang melayani tidak hanya Kabupaten Biak Numfor tetapi juga daerah sekitarnya di Provinsi Papua. Sektor administrasi pemerintahan juga merupakan sektor basis dengan nilai LQ rata-rata 1,572 yang menempati urutan kedua tertinggi. Tingginya nilai LQ pada sektor ini mencerminkan peran pemerintah yang sangat dominan dalam perekonomian Kabupaten Biak Numfor, yang merupakan karakteristik umum daerah-daerah di Papua dimana sektor publik masih memegang peranan sentral.

Di sisi lain, sektor konstruksi dengan nilai LQ hanya 0,319 mengindikasikan bahwa kegiatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Biak Numfor sangat bergantung pada kontraktor dan material dari luar daerah. Sektor jasa pendidikan dan jasa kesehatan sebagai sektor non basis merupakan temuan yang cukup memprihatinkan karena kedua sektor ini sangat terkait dengan kualitas sumber daya manusia, padahal Kabupaten Biak Numfor memiliki IPM tertinggi di Papua. Hal ini berarti kapasitas penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Biak Numfor belum mencukupi kebutuhan domestik, sehingga sebagian masyarakat masih harus mencari layanan tersebut di luar daerah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Biak Numfor memiliki sembilan sektor basis dengan efek multiplier rata-rata sebesar 1,31 terhadap perekonomian daerah, masih terdapat berbagai tantangan struktural yang perlu diatasi. Efek multiplier yang tergolong moderat dan cenderung menurun dari tahun 2020 hingga 2023 mengindikasikan bahwa keterkaitan antara sektor basis dan sektor non basis di Kabupaten Biak Numfor belum cukup kuat. Idealnya, menurut teori basis ekonomi yang dikemukakan oleh Taringan (2005) dan Adisasmita (2005), pertumbuhan sektor basis akan mendorong pertumbuhan sektor non basis melalui peningkatan

pendapatan masyarakat yang kemudian dibelanjakan untuk barang dan jasa dari sektor non basis. Namun kenyataannya, masih banyak sektor non basis yang tidak dapat terlayani oleh perekonomian domestik sehingga permintaan masyarakat justru terpenuhi oleh produk dari luar daerah, yang menyebabkan efek multiplier tidak sebesar yang diharapkan.

Kondisi ini diperparah oleh pola konsumsi masyarakat yang tercatat hanya 46 persen untuk barang non makanan dan jasa berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016, yang berarti daya beli masyarakat masih terbatas sehingga tidak mampu menciptakan permintaan agregat yang cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan sektor non basis. Selain itu, masih terdapatnya delapan sektor non basis, terutama sektor konstruksi, pendidikan, kesehatan, dan jasa perusahaan, menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam perekonomian Kabupaten Biak Numfor. Sektor konstruksi yang memiliki nilai LQ sangat rendah mengindikasikan bahwa setiap proyek pembangunan infrastruktur di daerah ini mengalami kebocoran ekonomi yang signifikan. Sektor pendidikan dan kesehatan yang non basis menunjukkan bahwa meskipun IPM tertinggi di Papua, kualitas layanan pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan.

Implikasi kebijakan dari temuan penelitian ini adalah bahwa pemerintah Kabupaten Biak Numfor perlu melakukan strategi pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pengembangan sektor basis yang sudah ada, tetapi juga secara simultan membangun kapasitas sektor non basis. Untuk sektor konstruksi, pemerintah dapat mendorong pengembangan kontraktor lokal, menyediakan pelatihan bagi tenaga kerja konstruksi, dan memfasilitasi industri material bangunan lokal. Untuk sektor pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas layanan dan fasilitas perlu terus dilakukan agar masyarakat tidak perlu lagi mencari layanan ke luar daerah. Untuk sektor industri pengolahan, pengembangan industri berbasis perikanan harus menjadi prioritas agar nilai tambah dari potensi kelautan yang melimpah dapat dinikmati di dalam daerah. Dengan demikian, efek multiplier dari sektor basis dapat meningkat dan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Biak Numfor.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, terdapat dua kesimpulan utama yang dapat diambil sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu mengenai sektor-sektor basis dan non basis di Kabupaten Biak Numfor serta besarnya efek multiplier sektor basis terhadap perekonomian daerah tersebut selama periode 2019 hingga 2023.

1. Berdasarkan analisis Location Quotient (LQ) terhadap data PDRB Kabupaten Biak Numfor dan Provinsi Papua periode 2019-2023, ditemukan bahwa terdapat sembilan sektor basis di Kabupaten Biak Numfor, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan nilai LQ 1,3949; sektor pertambangan dan penggalian dengan LQ 1,239; sektor industri pengolahan dengan LQ 1,289; sektor pengadaan listrik dan gas dengan LQ 3,291; sektor pengadaan air dan pengelolaan sampah dengan LQ 1,261; sektor perdagangan besar dan eceran dengan LQ 1,2427; sektor transportasi dan pergudangan dengan LQ 1,0917; sektor jasa keuangan dan asuransi dengan LQ 1,3176; serta sektor administrasi pemerintahan dengan LQ 1,5718. Sementara itu, terdapat delapan sektor non basis yaitu sektor konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, real estate, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya.
2. Merujuk pada hasil analisis multiplier effect, nilai efek multiplier sektor basis terhadap perekonomian Kabupaten Biak Numfor selama periode 2019-2023 secara berturut-turut adalah 1,3069; 1,3205; 1,3070; 1,2996; dan 1,2955, dengan nilai rata-rata sebesar 1,3059. Angka ini berarti setiap peningkatan satu unit output pada sektor basis akan meningkatkan output total perekonomian sebesar 1,3059 unit atau menghasilkan efek pengganda sebesar 30,59 persen di luar peningkatan awal. Meskipun nilai multiplier berada di atas satu yang mengindikasikan adanya efek positif, tren penurunan dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan bahwa keterkaitan antara sektor basis dan sektor non basis masih lemah, sehingga pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas sektor non basis terutama konstruksi, pendidikan, dan kesehatan agar efek multiplier dapat lebih optimal dirasakan oleh perekonomian daerah.

Secara keseluruhan penelitian ini menyimpulkan bahwa Kabupaten Biak Numfor memiliki sembilan sektor basis dengan efek multiplier rata-rata sebesar 1,3059 yang berarti sektor-sektor basis tersebut memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah, namun efektivitas multiplier tersebut masih terbatas dan cenderung melemah karena lemahnya keterkaitan antara sektor basis dan sektor non basis serta masih tingginya ketergantungan daerah terhadap pasokan barang dan jasa dari luar daerah, terutama pada sektor-sektor non basis seperti konstruksi, pendidikan, kesehatan, dan jasa perusahaan.

2. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor agar mampu membuat kebijakan yang mendukung pengembangan sektor-sektor basis, terutama sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan unggulan utama dengan nilai LQ rata-rata 1,3949, dengan cara mengembangkan industri pengolahan hasil perikanan agar nilai tambah dapat dinikmati di dalam daerah dan efek multiplier yang saat ini rata-rata 1,3059 dapat meningkat. Pemerintah daerah juga perlu memberikan perhatian khusus pada sektor-sektor non basis yang memiliki nilai LQ sangat rendah, terutama sektor konstruksi yang nilai LQ-nya hanya 0,3187, serta sektor jasa pendidikan dan jasa kesehatan yang masih non basis meskipun Biak Numfor memiliki IPM tertinggi di Papua. Pemerintah perlu mendorong pengembangan kontraktor lokal untuk mengurangi kebocoran ekonomi, meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan agar masyarakat tidak perlu lagi mencari layanan ke luar daerah, serta mengoptimalkan potensi pariwisata bahari yang masih terkendala oleh lemahnya sektor akomodasi dan makan minum dengan nilai LQ hanya 0,6466.

Adapun untuk penelitian lebih lanjut, dapat disarankan kepada para peneliti selanjutnya agar menjadikan hasil penelitian ini sebagai acuan awal untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam, terutama yang berhubungan dengan komoditas-komoditas spesifik dalam sektor basis dan sub-sektor unggulan di Kabupaten Biak Numfor, mengingat penelitian ini masih sangat terbatas pada analisis tingkat sektor. Untuk itu, peneliti selanjutnya menggunakan alat analisis yang lebih beragam seperti Shift Share, Tipologi Klassen, atau analisis Input-Output, serta memperpanjang periode waktu penelitian agar dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih terfokus, jelas, dan akurat bagi pembangunan ekonomi Kabupaten Biak Numfor.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmitha, R. (2005). Dasar-dasar ekonomi wilayah. Graha Ilmu.
- Adisasmitha, R. (2008). Pengembangan wilayah konsep dan teori. Graha Ilmu.
- Alen, P., & Ellen. (2018). Analisis sektor basis dan non basis di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Ekonomi*, 14(2).
- Arsyad, L. (1999). Pengantar perencanaan pembangunan ekonomi daerah. BPFE.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor. (2013-2016). Produk domestik regional bruto Kabupaten Biak Numfor. BPS Kabupaten Biak Numfor.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor. (2017-2022). Produk domestik regional bruto Kabupaten Biak Numfor. BPS Kabupaten Biak Numfor.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor. (2023). Produk domestik regional bruto Kabupaten Biak Numfor. BPS Kabupaten Biak Numfor.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2013-2016). Produk domestik regional bruto Provinsi Papua. BPS Provinsi Papua.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2017-2022). Produk domestik regional bruto Provinsi Papua. BPS Provinsi Papua.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2023). Produk domestik regional bruto Provinsi Papua. BPS Provinsi Papua.
- Hendris, H., Permana, S. E. D., & Fauziah, N. (2022). Analisis wilayah basis dan multiplier effect komoditas padi di Kalimantan Utara. *Jurnal Ilmiah*.
- Hutahean, M. J., & Siagian, W. (2018). Analisis multiplier effect pertumbuhan ekonomi sektor basis Kabupaten Gunung Mas [Skripsi].

- Hutapea, A., Koleangan, R. A. M., & Rorong, I. P. F. (2020). Analisis sektor basis dan non basis serta daya saing ekonomi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Medan. *Jurnal Berkala Ilmiah*, *ejournal.unsrat.ac.id*.
- Jaya, A. H. (2022). Analisis sektor basis dan non basis dalam perekonomian Kabupaten Banggai tahun 2014-2018.
- Jhingan, M. L. (2003). *Ekonomi pembangunan dan perekonomian*. PT Raya Grafindo Persada.
- Mahyudi, A. (2004). *Ekonomi pembangunan dan analisis data empiris*. Ghalia Indonesia.
- Muchdie, M., Imansyah, M. H., & Prihawantoro, S. (2020). Analisis keterkaitan spasial di enam negara Asia: Analisis input-output dunia.
- Pitaloka, C. P., Jumiaty, A., & Wibisono, S. (2022). Analisis keterkaitan dan multiplier efek sektor industri pengolahan terhadap perekonomian nasional. *Jurnal Ekuilibrium*, *4(2)*, 11-28.
- Purnomo, R. (2024). Analisis penentuan sektor-sektor unggulan. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Komunikasi*, *1(3)*, 12-20.
- Sapriadi, S., & Hasbiullah, H. (2015). Analisis penentuan sektor unggulan perekonomian Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Iqtisaduna*, *1(1)*, 53-71.
- Savitri, D. (2008). Analisis identifikasi sektor unggulan dan struktur ekonomi Pulau Sumatera [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- Siwu, H. F. (2019). Strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, **19*(3)*.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi regional: Teori dan aplikasi*. Baduose Media.
- Sukirno, S. (2002). *Pengantar teori makro dan lanjutan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, H. (2014). Analisis sektor basis dan non basis terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto tahun 2003-2012. [Skripsi].
- Syawal, T., & Nursini. (2022). Analisis sektor basis perekonomian daerah studi kasus Bulukumba.
- Tarigan, R. (2005). *Ekonomi regional: Teori dan aplikasi*.
- Usman, A. A., & Bakar, A. (2016). Analisis sektor unggulan dalam struktur perekonomian Kabupaten Mimika. *Jurnal Ekonomi*.
- Usmany, E. D. (Tahun tidak tersedia). Analisis sektor basis dan non basis terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung. [Skripsi].